

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan. Pada Bab 8 Mengenai Pengembangan Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah”. Kota Bandung tak lepas dari sisi produktif anak muda, bahkan hal itu dibuktikan dengan penganugerahan penghargaan kepada Kota Bandung sebagai kabupaten/kota layak pemuda oleh Kemenpora pada tahun 2017. Kota layak pemuda ini merupakan salah satu program unggulan yang diprioritaskan Kemenpora Republik Indonesia untuk meningkatkan mutu standarisasi kepemudaan di seluruh Indonesia. Sehingga semua kota/kabupaten di Indonesia mempunyai standarisasi dalam pengembangan pemuda yang berusia 16-30 tahun dalam pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui beberapa program kegiatan kepemudaan.

Tujuan terselenggaranya Kota Layak Pemuda di Kota Bandung dalam pembangunan pemuda mampu menopang berbagai kegiatan sehingga bisa bersinergi dengan dinas terkait, berharap lahirnya aturan tersebut mampu bersinergi untuk meningkatkan kapasitas pemuda dengan harapan lingkup tiap dinas melakukan pembinaan seperti UMKM hingga pariwisata, dengan Perda

Kepemudaan bisa bersinergi juga dengan unsur kewilayahan untuk memaksimalkan para pemuda berpartisipasi pada berbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya, dengan adanya Perda kepemudaan, harapannya aparaturnya punya perhatian kepada kepemudaan. Kebijakan pembangunan pelayanan kepemudaan ini menjadi sektor penting.

Terjalannya hubungan yang baik dan terjaga antara Dispora dan KNPI ini disambut hangat dan bisa dirasakan oleh banyak pihak yaitu salah satunya upaya menyambut kota layak pemuda dan memperoleh dukungan penuh dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandung. Terjalannya kolaborasi ini diharapkan KNPI semoga bisa memikirkan strategi bersama-sama terlepas KNPI itu ialah mitra strategis dengan kewilayahan. Soal eksistensi kepemudaan di kecamatan, hal itu bisa dikordinasikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Salah satu program kegiatan kolaborasi pada setiap kecamatan ini yaitu pendampingan UMKM, yang didampingi langsung oleh Dinas KUMKM yang bersinergi dengan para pemuda sekitar, kemudian pada saat ini ada pendampingan tiap kecamatan terdapat 660 UMKM, hal ini agar memiliki kegiatan yang bisa meningkatkan wilayah juga perekonomian di tiap wilayahnya. Dengan melakukan kompetisi tiap kecamatan hal ini semoga bisa meningkatkan kualitas para pemuda dengan tiap kecamatan diadakan perlombaan UMKM Awards, semoga hal ini mampu menggerakkan serta meningkatkan perekonomian setiap kecamatan.

Alamsyah (2022), Standar dan tujuan kebijakan sudah jelas, baik dari segi sosiologis, filosofis maupun yuridis, bahwa minuman yang mengandung alkohol secara nyata dapat merugikan kesehatan manusia, mengancam kehidupan masa

depan generasi muda, bangsa dan menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan yang tidak terpuji yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, bahwa peredaran dan penggunaan minuman yang mengandung alkohol saat ini sangat berbahaya sehingga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang beragama, bermoral dan berbudi luhur.

Ariesmansyah (2020), Hubungan kerjasama yang terjalin antara Kota Bandung dengan kota-kota tersebut tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang-bidang lainnya. Oleh karenanya, hubungan kerjasama harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, kontruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu untuk yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.

Tercatat bahwa ada sekitar 51% penduduk di Kota Bandung yang didominasi oleh generasi milenial dan gen-z, generasi milenial yaitu orang yang lahir pada tahun 1981-1996, sedangkan generasi Z yaitu orang yang lahir pada tahun 1997-2012. Dari total jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2,44 juta jiwa, terdapat sebanyak 1,72 juta jiwa penduduk yang merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun). Merujuk pada data penduduk berdasarkan pekerjaan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk yang mencapai urutan pertama adalah kelompok pelajar dan mahasiswa yang jumlahnya 544.30 orang, dan yang urutan kedua yaitu kelompok pekerjaan “mengurus pekerjaan rumah tangga” sejumlah 524.202

orang, kemudian pada urutan ketiga yakni yang tidak memiliki pekerjaan atau belum bekerja sebanyak 469.067 orang. Jumlah partisipasi pemuda dalam implementasi kebijakan kota layak pemuda di Kota Bandung ini bisa terbilang masih cukup rendah. Dalam hal ini maka pihak pemerintah kemudian menggagas kegiatan inovatif dengan harapan para pemuda bisa ikut terlibat dan bisa berkreasi dibidang masing-masing, melihat bonus demografi pada tahun 2020 – 2035 mendatang, dimana para pemudanya akan mendominasi masyarakat keseluruhan.

Indeks pembangunan pemuda di Kota Bandung pada tahun 2022 dari subtema indikator keberhasilan sebesar 54 poin, angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda sebesar 46,67 poin dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,69% kemudian ada indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 61,6 poin, indeks risiko bencana sebesar 144 poin, serta indeks pembangunan pemuda sebesar 54 poin. Kemudian pada domain pendidikan pemudanya sebesar 70% menunjukkan pendidikan ini berperan sangat penting untuk kemajuan pembangunan para pemudanya, selanjutnya pada domain gender dan diskriminasi pemuda sebesar 50% yakni mampu mentoleransi gender apapun untuk ikut terlibat dalam mengambil peran partisipasi serta kontrol dalam hasil pembangunan pemuda. Pada domain selanjutnya ada kesehatan dan kesejahteraan pemuda sebesar 45%. Kemudian pada domain berikutnya ada pada lapangan dan kesempatan kerja pemuda yaitu 45%. Dan yang terakhir yakni pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda 43,33% keikutsertaan pemuda dalam partisipasi dan kepemimpinan pemuda ini cukup rendah, hal ini bisa menjadi perhatian lebih

untuk pemerintah agar bisa lebih meningkatkan dalam pembangunan kepemudaan.

Pengambilan sebuah kebijakan dari sekitar 50% penduduk Kota Bandung adalah peran pemuda sebagaimana kita ketahui, pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri sehingga perlu berkolaborasi dengan pemuda. Jika melihat potensi pemuda di Kota Bandung, kami optimis kolaborasi antara pemerintah dan pemuda bisa membangun Kota Bandung tumbuh menjadi lebih baik dan maju lebih cepat. Pemuda layak berprestasi, berinovasi dan berkarya dalam mengembangkan nilai positif untuk kemajuan bangsa dan semoga dari kegiatan ini bisa mendorong semangat para pemuda agar banyak melahirkan inspirasi dan karya besar di Kota Bandung. Program ini sangat diapresiasi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandung demi mewujudkan program Kecamatan layak pemuda. Langkah ini disebut sebagai upaya menguatkan geliat kolaborasi kepemudaan tingkat kota bersama Pemkot Bandung. Inisiasi upaya mendorong pemerintahan di tingkat kecamatan untuk lebih berperan dalam melakukan program pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan.

Fakta empiris memperlihatkan bahwa Kota Bandung disebut juga dengan kota kreatif hal ini yang menandakan bahwa Kota Bandung layak menjadi Kota Layak Pemuda. Oleh sebab itu, unsur utamanya adalah karakter manusianya dan Bandung dari dulu dikenal dengan pusat desain seni, fashion, musik dan kreatifitas komunitasnya sendiri yang sangat aktif membuat pergerakan. Kota Bandung telah mencapai posisi yang luar biasa sebagai barometer mode dan kreativitas pemuda. Prestasi ini tidak lepas dari tekad untuk terus berinovasi dan

beradaptasi dalam jangka pendek, serta fokus pada pelatihan pemuda untuk masa depan yang lebih kompetitif dalam jangka panjang. Dengan dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat, Kota Bandung akan terus menjadi teladan dalam perkembangan pemuda dan kreativitas.

Konsep yang diterapkan Kota Bandung ini adalah desentralisasi, yaitu Kota Bandung akan mempunyai pusat pemuda dan ekonomi kreatif, yang rencananya akan digunakan untuk membangun kreasi dan kreatifitas pemuda serta akan menjadi yang pertama di Indonesia. Dengan komunitas yang lebih dari 5.000, LPM, organisasi dan sebagainya mudah-mudahan dengan demikian hal tersebut bisa menjadi penguat. Sehingga di Kota Bandung ini ada ruang untuk kepemudaan yang basisnya tingkat kelurahan dengan jumlah kelurahan di Kota Bandung yaitu mencapai 151 kelurahan agar bisa menjadi dasar untuk kota layak pemuda. Konteks yang dihadapi menuntut entitas untuk menjadi dinamis dan adaptif. Kesesuaian dengan perubahan, pendekatan yang beragam, dan fokus pada kebutuhan masyarakat menjadi landasan dalam menjaga relevansi dan kontribusi positif terhadap masyarakat dan zaman. Dalam esensi inilah keberlanjutan, pertumbuhan, dan perkembangan terwujud.

Permasalahan yang sering terjadi khususnya di Kota Bandung ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak diantaranya terjadinya pembegalan, pencurian kendaraan dan penjambratan kemudian terjadinya tawuran antar warga, perkelaian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain, kebanyakan dari semua para pelakunya adalah seorang pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang ada

permasalahan dalam keluarga ataupun pekerjaannya yang kemudian bisa saja lari ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam pengaruh minuman beralkohol dan dalam pengaruh obat-obatan terlarang yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. hal ini menunjukkan bahwa inilah salah satu faktor indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Permasalahan bisa muncul ketika para generasi muda ini kurangnya dalam bermoral dan beretika, dikarenakan kurangnya teladan atau contoh yang baik terutama untuk para generasi muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Hal ini menjadi penting sebab teladan dibutuhkan sebagai figure maupun role model yang dapat mempengaruhi masyarakat baik untuk bertutur hingga bersikap, perlu peran dari seluruh pihak agar penanaman moral dan pemberian contoh atau teladan tersebut efektif dapat dibina sejak dini, tidak perlu jauh-jauh dapat melalui keluarga inti terlebih dahulu, kemudian lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat secara luas.

Program pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten lebih memperhatikan pembinaan dan pemberdayaan pemuda. Pertama yaitu regulasi, adanya PERDA tentang kepemudaan, infrastruktur, kelembagaan, dan kemandirian pemuda atau pemuda pelopor dalam hal UMKM. Selain itu, Kota Bandung juga mempunyai program PIPPK didalamnya itu terdapat karang taruna sebagai organisasi kepemudaan untuk ikut hadir dalam memberikan perkembangan di kewilayahan. Dari hal tersebut wajarlah pemerintah setempat

banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan strategi kebijakan yang mengikut sertakan dan memberdayakan pemuda.

Peran kepemudaan yang penting dalam proses pembangunan dan berpartisipasi untuk menyelesaikan tantangan persoalan dalam bidang sosial dan lingkungan. Tantangan utama generasi muda pada saat ini adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi maka yang harus dilakukan secara bersama-sama khususnya para generasi muda ini yaitu melalui penguatan literasi digital baik dari sisi teknis maupun dalam etika berbudaya di dunia digital. Selain itu, untuk menghadapi tantangan pada generasi muda yaitu membangun kepedulian sosial sejak dini serta pemuda berperan penting sebagai subjek pembangunan dan menjadi agen perubahan untuk lingkungannya, melalui partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan. Kesadaran setiap orang tua juga sangat berperan penting untuk membangun kesadaran sosial terhadap anak sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga.

Berkaca dari permasalahan kota lain yakni pada kota Semarang, kegiatan penyadaran pemuda yang terdiri atas perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif terlarang lainnya, perlindungan pemuda dari sex bebas, perlindungan pemuda dari tindak kekerasan, serta perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme yang telah dilaksanakan di Kota Semarang adalah sejumlah 118 kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan hasil penyelenggaraan oleh instansi pemerintah dan lembaga pendidikan yang melibatkan berbagai instansi terkait dan didukung oleh pendanaan dari APBN, APBD, BUMN Yayasan, Swasta dan Swadaya Masyarakat.

Implementasi dari kota lain dan Kota Bandung pun sama halnya yaitu dengan adanya kegiatan pengembangan pemuda, seperti hal-nya yang telah dilaksanakan di Kota Semarang terdiri atas kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, rekrutmen sukarelawan dari pemuda, pelatihan bagi organisasi kepemudaan, serta pelatihan bagi kepemimpinan bagi pemuda. Jumlah kegiatan yang telah terselenggara adalah 92 kegiatan yang secara rutin dan bervariasi diselenggarakan oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan swasta (BUMN). Hal ini bisa menjadi peningkatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda di wilayahnya.

Kota Bandung dengan luas wilayahnya yang meliputi keragaman yang kaya dari berbagai aspek, menemukan dirinya di tengah-tengah tantangan yang kompleks dalam upaya memajukan pemuda dan ide-ide baru. Dalam suatu kota yang besar dan beragam, setiap individu membawa pandangan, pengalaman, dan harapan yang berbeda. Kondisi ini secara alami memunculkan kerumitan dalam merumuskan gagasan dan konsep yang dapat meyakinkan masyarakat secara keseluruhan. Kendala dalam mengatasi hambatan tersebut tampak jelas, menyesuaikan pandangan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan yang beragam, dan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam regulasi baru merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap mudah.

Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung adalah meyakinkan masyarakat tentang ide-ide baru yang mungkin berbeda dari pemahaman dan pandangan mereka sebelumnya. Dalam realitas dinamis masyarakat, tidak semua orang memiliki perspektif yang sama. Perbedaan

pandangan ini menciptakan kompleksitas dalam mendapatkan dukungan dan penerimaan atas ide-ide baru yang diusulkan. Tantangan ini menjadi rintangan yang signifikan dalam menggerakkan perubahan dan inovasi di lingkungan yang heterogen. Sadar akan tantangan ini, pihak terkait di Kota Bandung telah mengambil langkah untuk menghadapinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong adopsi regulasi yang baru. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum dan struktur yang mendukung pelaksanaan program-program pembangunan, terutama dalam konteks kepemudaan. Melalui regulasi yang lebih baru, pemerintah berupaya memfasilitasi pemenuhan program-program tersebut dengan lebih efektif

Ide-ide baru dan regulasi baru ini dapat menjadi bagian integral dari arah pembangunan Kota Bandung, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan teliti. Proses pembangunan narasi yang mendukung ide-ide ini haruslah kuat, mengkomunikasikan manfaat dan dampak positif yang akan dihasilkan. Lebih dari itu, untuk menjadikannya kebijakan pemerintah kota, prosedur-prosedur yang detail dan teliti harus diikuti. Secara keseluruhan, Kota Bandung dihadapkan pada tantangan kompleks dalam memajukan pemuda dan inovasi baru. Dalam upaya menghadapi kendala dalam meyakinkan masyarakat dan mengatasi hambatan dalam perubahan regulasi, kota ini berusaha mendorong adopsi regulasi yang baru. Namun, kesadaran akan kerumitan ini mengharuskan pihak terkait untuk membangun argumen dan pendekatan yang kuat serta mengikuti prosedur-prosedur yang cermat dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik bagi pemuda di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung, ditemukan terlihat beberapa indikator masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda di Kota Bandung antara lain:

1. Berkaitan dengan tingkat kepatuhan aturan yang sudah berjalan dan sedang meningkatkan kebutuhan para pemudanya, hal ini terlihat dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan. Contohnya adanya kesulitan dalam membangun narasi yang mendukung ide-ide baru dan menjadikannya kebijakan pemerintah dapat diukur melalui respons dan reaksi masyarakat terhadap regulasi kebijakan ini.
2. Berkaitan dengan tingkat lancarnya rutinitas fungsi terdapat adanya keterbatasan dana dalam pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan. Contohnya, dalam hal ini kehadiran masalah anggaran menjadi indikator masalah, perlu adanya upaya untuk mengantisipasi kendala anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan kepemudaan.
3. Berkaitan dengan tingkat tewujudnya kinerja aparatur dan dampak yang dikehendaki tidak diselaraskan dengan fasilitas prasarana dan infrastruktur SDM. Contohnya terkait dengan kendala fasilitas prasarana yang kurang lengkap dan kurang memadai, atau kurikulum yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kualitas program pembinaan pemuda. Dalam pembinaan infrastruktur SDM dan pelatihan khusus

harus adanya penyesuaian program apabila tidak disesuaikan dengan kebutuhan kepemudaan yang berkembang ini bisa menjadi masalah dalam menjaga relevansi dan dampak positif program.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung yang dituangkan dalam suatu usulan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kota Layak Pemuda di Dispora Kota Bandung .”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian implementasi kebijakan ini pada kebijakan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, berkaitan dengan pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung. Dilihat dari urgensi mengenai aspek bagaimana implementasi kebijakan pemerintahan di bidang layanan pemuda berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda di tingkat kabupaten/kota.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke tempat observasi dengan lokasi penelitian di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, tentang Pengembangan Kota Layak Pemuda di Dispora Kota Bandung. Menurut Ripley dan Franklin (2007:145) yang mengidentifikasi tiga faktor mendukung antara lain:

- 1) Kepatuhan
- 2) Lancarnya Rutinitas Fungsi
- 3) Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda Dispora Kota Bandung?
2. Faktor pendorong apa saja yang menjadikan implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong apa saja yang menjadikan implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan tujuan penelitian diatas, kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam mengembangkan teori-teori ilmu Administrasi Publik khususnya yang bersangkutan dengan implementasi kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak umum yang menaruh perhatian dan minat untuk dikaji lebih lanjut mengenai program pengembangan kota layak pemuda di Kota Bandung.